

Kajian yuridis pengaturan sistem karantina produk impor tumbuhan dan buah buahan di Indonesia berdasarkan perjanjian world trade organization dibidang sanitary and phyto sanitary = Study on regulation of quarantine system of import vegetables and fresh fruits products in indonesia based om world trade organization agreement on sanitary and phyto sanitary

Andhika Juliansyah, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20389118&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Perdagangan Internasional mengharuskan Indonesia membuka diri bagi masuknya produk ? produk import kedalam pasar domestic. Hal ini memang membawa dampak positif bagi konsumen. Yaitu tersedianya pilihan barang untuk dikonsumsi. Namun, selaras dengan hal tersebut harus ditingkatkan standar kelayakan serta keselamatan produk tersebut. Salah satu produk yang menjadi perhatian adalah produk impor tumbuhan dan buah ? buahan segar. Berdasarkan hal diatas, sangat penting untuk mengkaji mengenai sistem karantina produk impor tumbuhan dan buah ? buahan di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melihat secara komprehensif sistem tersebut, dan menentukan apakah sistem tersebut telah sesuai dengan aturan SPS Agreement dan peran pemerintah pusat dalam memaksimalkan sistem karantina di Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan wawancara dengan Badan Karantina Pertanian dan Kementerian Pertanian Indonesia sebagai salah satu metode pengumpulan data. Penulis menyatakan bahwa UU No. 16/1992 wajib untuk diamandemen mengikuti perkembangan IPPC 1997 yang dirujuk oleh SPS Agreement dan Peran pemerintah untuk mengoptimalisasi system karantina adalah dengan meliberalisasi kebijakannya.

<hr>

ABSTRACT

International trade realm obliges Indonesia to let import products into its Domestic market with openness. This caused positive impact for consumer. Which is the availability of products to consume. However, in line with it, products safety standard shall be upgraded. One of the products gained fully attention is horticulture products (Fresh vegetables and fruits). According to that, it's substantial to review Indonesian?s policy about Agriculture Quarantine system for Imported Horticulture products. The purpose of this writings is to seek comprehensively and determine the conformity of such system against SPS Agreement, and Government?s role to optimize such system. This Writings shall be conducted normatively, and exclusive interviews with Agriculture Quarantine Agency and Ministry of Agriculture as data collection method. The researcher

suggests that Act number 16/1992, shall be revised, conformed with IPPC 1997, which is referenced by the SPS Agreement, and Liberalisation is the key role for government in order to optimize Agriculture Quarantine system.